

# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

## LAPORAN HASIL KEGIATAN

---

“Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)”

---



Disusun Oleh

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H. | 1406059401

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

---

**2023**

Judul Kegiatan : Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)

Nama Dosen : Djamaludin, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Kepidanaan

Telepon : (0981) 2911909

Situs Web : stihbiak.ac.id

Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2023 Penulis



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

## LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Kegiatan	: Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT)
2	Penulis/Ketua Tim Penulis *)	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	: 1406059401 / Gol. IIIB
	c. Pangkat/JabatanFungsional	: Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
	d. Program Studi	: Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	: Pidana
3.	Tanggal Penyelesaian Laporan	: 25 Juni 2023

Mengetahui  
Ketua STIH Biak-Papua



Biak, 25 Juni /tahun  
Penulis

Djamaludin, S.H., M.H.  
NIDN. 1406059401

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai insan yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelenggarakan kegiatan ini serta memberikan kesempatan kepada kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk berpartisipasi dalam webinar yang berharga ini. Kegiatan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu memperkuat kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam pendidikan antikorupsi di wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

Dalam laporan ini, kami merangkum dengan seksama rangkaian kegiatan webinar, materi-materi yang disampaikan, serta diskusi yang terjadi selama sesi tanya jawab. Kami juga menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan ini, serta menyimpulkan dampak yang dapat diperoleh dalam pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Laporan hasil kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua atas partisipasi kami dalam webinar ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kontribusi serta hasil yang kami peroleh melalui kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama, dukungan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta peserta yang telah berkontribusi dalam diskusi dan tanya jawab. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

Kami berharap laporan hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan referensi yang berharga serta memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Semoga upaya kami dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan komitmen dalam melawan korupsi melalui pendidikan dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam membangun sebuah lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab di semua lini kehidupan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Biak, 25 Juni 2023

Djamaludin, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN _____	iii
KATA PENGANTAR _____	iv
DAFTAR ISI _____	v
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Tujuan Kegiatan _____	2
1.3. Peserta _____	3
BAB II LAPORAN KEGIATAN _____	4
2.1. Bentuk Kegiatan _____	4
2.2. Pelaksanaan Kegiatan _____	4
2.3. Jadwal kegiatan _____	4
2.4. Rangkuman Materi _____	5
BAB III PENUTUP _____	9
3.1. Kesimpulan _____	9
3.2. Saran _____	10
LAMPIRAN _____	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya beberapa regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan perguruan tinggi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki latar belakang yang mendasari perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas dosen pengampu serta calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi sebagai tindaklanjut dari regulasi PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi PAK. Beberapa faktor latar belakang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Eskalasi Kasus Korupsi

Korupsi menjadi masalah serius yang terus menghantui bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang merugikan secara sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya konkret dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

#### 2) Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, nilai-nilai integritas, dan moralitas yang kuat dalam masyarakat. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada dosen pengampu dan calon pengampu.

#### 3) Perlunya Penguatan Kapasitas

Dalam melaksanakan tugas pengampuan di bidang pendidikan antikorupsi, dosen pengampu dan calon pengampu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang korupsi, mekanisme pencegahan, serta metode pengajaran yang efektif. Penguatan kapasitas melalui kegiatan seperti webinar ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa.

#### 4) Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Dengan menyelenggarakan kegiatan webinar ini, KPK berupaya mendukung perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara efektif.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bersama dengan perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT turut berpartisipasi dalam kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV. Melalui kegiatan ini, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang korupsi, pencegahan korupsi, dan metode pengajaran yang efektif, diharapkan para dosen pengampu dan calon pengampu akan mampu menginspirasi mahasiswa mereka untuk menjadi generasi yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV ini dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan spesifik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kegiatan ini:

### 1) Meningkatkan Pemahaman tentang Korupsi dan Pencegahannya

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan mekanisme pencegahan korupsi, baik di tingkat individu maupun institusional.

### 2) Mengembangkan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu

Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi. Melalui webinar ini, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai metode pengajaran yang inovatif dan efektif dalam menyampaikan materi pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan meningkatnya kapasitas mereka, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan.

### 3) Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dosen pengampu dan calon pengampu diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.

### 4) Memperkuat Jaringan Kerjasama dan Kolaborasi

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan kerjasama dan kolaborasi antara perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, perguruan tinggi dapat saling mendukung dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan program pendidikan antikorupsi.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

### **1.3. Peserta**

Peserta dalam kegiatan ini merupakan dosen-dosen yang ada pada perguruan tinggi di Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT baik sebagai dosen pengampu dan calon dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.



## **BAB II**

### **LAPORAN KEGIATAN**

#### **2.1. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan daring melalui media aplikasi *zoom virtual* dan *live youtube* mengingat banyaknya jumlah peserta dan luasnya cakupan wilayah serta kondisi pandemi covid-19.

#### **2.2. Pelaksanaan Kegiatan**

Hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 – 22 Juni 2023

Waktu : 08.30 – 12.30

WITA Tempat : Zoom Webinar

Peserta : Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

#### **2.3. Jadwal kegiatan**

##### *Penguatan Kapasian Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi*

<i>Hari Ke-1 (21 Juni 2023)</i>				
No	Waktu (Dalam WITA)	Durasi	Kegiatan	Pengisi
1	08.30-08.40	10'	Pembukaan oleh moderator	Panitia KPK
2	08.40-09.00	20'	Pembacaan peraturan peserta	Moderator
3	09.00-10.30	90'	Pemaparan Materi 1: Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam pendidikan Anti Korupsi	Aida Ratna Zulaiha (Dir. Jejaring Pendidikan KPK)
4	10.30-12.30	120'	Pemaparan Materi 2: Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran	Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB)
5	12.30-12.35	5'	Penutupan	Panitia KPK
<i>Hari Ke-2 (26 Mei 2023)</i>				
1	08.30-08.35	5'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.35-10.35	120'	Pemaparan Materi 3: Pengenalan Tindak Pidana Korupsi	Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen UI)
3	10.35-12.35	120'	Pemaparan Materi 4: Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi	Ninie L. Karim (Psikolog, Dosen UI)
4	12.35-12.40	15'	Pengumuman dan Penutupan	Panitia KPK

## **2.4. Rangkuman Materi**

1) Pemaparan Materi 1 : Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam pendidikan Anti Korupsi

Narasumber : Aida Ratna Zulaiha (Direktur Jejaring Pendidikan KPK)

### **Deskripsi Singkat Materi**

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia. Dalam materi ini, Dir. Jejaring Pendidikan KPK menjelaskan tentang strategi yang diadopsi oleh KPK dalam membangun pendidikan anti korupsi. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai program, kegiatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh KPK dalam rangka mempromosikan integritas dan pencegahan korupsi melalui pendidikan.

Narasumber akan menguraikan komitmen KPK dalam memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi. Peserta juga akan diberikan informasi tentang arah kebijakan KPK dalam pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan antikorupsi. Selama sesi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara KPK dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Narasumber akan menjelaskan berbagai strategi yang dapat diimplementasikan dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik lainnya. Materi ini juga akan membahas upaya KPK dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam mengajar pendidikan antikorupsi secara efektif. Peserta akan diberikan wawasan tentang pelatihan, bahan ajar, dan sumber daya yang disediakan oleh KPK untuk mendukung dosen dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam pendidikan antikorupsi.

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menginspirasi peserta dalam berperan aktif dalam pendidikan antikorupsi, membangun jejaring kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi dan KPK, serta mendorong implementasi praktik terbaik dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi, peserta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, melahirkan generasi yang peduli terhadap upaya pencegahan korupsi, dan memberikan sumbangan nyata dalam membangun tata kelola yang baik di Indonesia.

- 2) Pemaparan Materi 2 : Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran  
Narasumber : Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB)

### Deskripsi Singkat Materi

Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran memberikan gambaran tentang bagaimana memadukan konsep pendidikan antikorupsi ke dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pada sesi ini, Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB) akan menjelaskan strategi dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Narasumber akan membahas pentingnya pendekatan terintegrasi dalam mengajar pendidikan antikorupsi, termasuk penggunaan metode, teknik, dan sumber daya yang relevan untuk memfasilitasi pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang korupsi serta upaya pencegahan korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai contoh pengajaran yang inovatif dan interaktif, seperti studi kasus, simulasi, permainan peran, diskusi kelompok, atau proyek komunitas, yang dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas. Narasumber juga akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada pembelajaran, serta memberikan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Peserta akan diberikan panduan praktis tentang bagaimana mengadaptasi materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan antikorupsi.

Materi ini juga akan menyoroti peran dosen sebagai fasilitator dan mentor dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung nilai-nilai integritas dan etika. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya contoh teladan, komunikasi yang efektif, dan penerapan keadilan dan transparansi dalam interaksi dengan mahasiswa. Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran bertujuan untuk memberikan ide dan inspirasi kepada peserta dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, kesadaran akan bahayanya, serta komitmen untuk mencegahnya. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari materi ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, memotivasi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan suasana belajar yang berintegritas di lingkungan akademik mereka.

- 3) Pemaparan Materi 3 : Pengenalan Tindak Pidana Korupsi  
Narasumber : Gandjar Laksamana Bonaprpta (Dosen UI)

#### Deskripsi Singkat Materi

Materi pengenalan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam kegiatan webinar ini. Pada sesi ini, Gandjar Laksamana Bonaprpta (Dosen UI) memberikan pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, yang menjadi permasalahan serius di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam materi ini, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan modus operandi yang umum dilakukan. Selain itu, akan dibahas pula aspek hukum dan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Narasumber akan menguraikan contoh-contoh kasus nyata tindak pidana korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga peserta dapat memahami secara praktis dampak dan konsekuensi dari tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selama sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami pentingnya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam membangun tata kelola yang baik dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Narasumber juga akan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Materi pengenalan tindak pidana korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat dan negara akibat tindak pidana korupsi. Peserta diharapkan mampu memahami pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi dan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam aktivitas akademik dan profesional mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana korupsi, peserta diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, mempromosikan integritas, dan membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi dan lingkungan sekitar mereka.

#### 4) Pemaparan Materi 4 : Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi

Narasumber : Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen UI)

##### Deskripsi Singkat Materi

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen UI) akan membahas konsep dan strategi komunikasi yang relevan dalam konteks pendidikan antikorupsi. Narasumber akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi dan bagaimana penerapannya dapat membantu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang bertanggung jawab dan berintegritas. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai teori komunikasi yang dapat digunakan untuk memahami dan mempengaruhi persepsi, motivasi, dan sikap peserta didik terhadap korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan mempelajari strategi komunikasi yang efektif, seperti pendekatan persuasif, penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan contoh kasus nyata, atau penggunaan teknologi komunikasi yang relevan, dalam rangka mengubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap korupsi. Narasumber juga akan membahas teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan wawasan tentang pengelolaan konflik, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan penggunaan komunikasi nonverbal yang efektif dalam menghadapi situasi pembelajaran yang kompleks. Materi ini juga akan menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya, nilai, dan norma sosial dalam proses komunikasi pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan panduan tentang bagaimana menyampaikan pesan antikorupsi dengan menghormati keanekaragaman budaya dan mempertimbangkan konteks lokal.

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi bertujuan untuk memberikan peserta pemahaman tentang bagaimana komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku dalam konteks antikorupsi. Dengan pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan memperkuat proses pembelajaran antikorupsi di lingkungan akademik mereka. Melalui penerapan psikologi komunikasi yang tepat, peserta didik akan lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi, memahami pentingnya integritas, dan terlibat dalam upaya pencegahan korupsi secara aktif di masyarakat.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sukses dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, para peserta dari perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi, implementasi, dan pentingnya pendidikan antikorupsi. Dalam sesi pengenalan tindak pidana korupsi, peserta memperoleh wawasan tentang definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta memahami dampak negatif yang ditimbulkannya. Materi tersebut memicu kesadaran peserta tentang pentingnya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi sebagai upaya membangun tata kelola yang baik. Selanjutnya, materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan antikorupsi memberikan gambaran tentang komitmen KPK dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia. Peserta menjadi lebih paham mengenai peran mereka sebagai pendidik dalam mempromosikan integritas, dan mendapatkan informasi mengenai program dan kerjasama yang dapat dilakukan dengan KPK. Materi implementasi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran memberikan contoh-contoh praktik terbaik dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Dosen pengampu dan calon pengampu mendapatkan ide dan strategi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang membangun pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Terakhir, materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Peserta diberikan panduan dalam menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan sensitif terhadap konteks budaya dalam proses pembelajaran antikorupsi. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Para peserta, baik dosen pengampu maupun calon pengampu, diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam upaya mencegah korupsi dan membangun masyarakat yang berintegritas. Kami berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas inisiatif dan dedikasinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kami juga mengapresiasi narasumber dan moderator yang telah memberikan kontribusi berharga dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang mendorong perubahan nyata dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan masyarakat secara luas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi, berbagi, dan saling belajar dalam kegiatan ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan komitmen kita dalam melawan korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

- 1) Melanjutkan Kolaborasi: Penting untuk menjaga dan melanjutkan kolaborasi antara KPK dan perguruan tinggi dalam menguatkan pendidikan antikorupsi. Kegiatan serupa dapat diadakan secara rutin atau dalam bentuk workshop, diskusi, atau pertemuan berkala guna memperkuat kerjasama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.
- 2) Meningkatkan Difusi Informasi: Selain melalui kegiatan webinar, disarankan untuk meningkatkan difusi informasi tentang pendidikan antikorupsi melalui berbagai media dan platform, seperti publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan media sosial. Hal ini akan membantu menjangkau lebih banyak peserta dan memperluas dampaknya dalam masyarakat.
- 3) Pemberdayaan Dosen dan Calon Pengampu: Selanjutnya, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam pemberdayaan dosen pengampu dan calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan kurikulum, akses ke sumber daya dan literatur terkini, serta mendukung pengembangan modul dan materi pendidikan antikorupsi yang relevan.
- 4) Integrasi dalam Kurikulum: Disarankan untuk mengupayakan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi secara menyeluruh. Dalam proses pengembangan kurikulum, nilai-nilai integritas, etika, dan pencegahan korupsi harus diperhatikan dan terintegrasi ke dalam berbagai program studi, baik dalam mata pelajaran khusus maupun melalui pendekatan lintas-mata kuliah.
- 5) Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data, pengukuran dampak, dan penggunaan indikator yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pendidikan antikorupsi yang dilakukan.
- 6) Pelibatan Mahasiswa: Libatkan mahasiswa secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dukung inisiatif mahasiswa dalam mengadakan kegiatan dan kampanye antikorupsi di kampus dan masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan memiliki potensi besar dalam membangun budaya antikorupsi.
- 7) Pengembangan Jaringan: Mendorong pengembangan jaringan antara perguruan tinggi dan lembaga antikorupsi lainnya baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama lintas lembaga dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pendidikan antikorupsi.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kegiatan penguatan kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu pendidikan antikorupsi dapat

memberikan dampak yang lebih besar dalam mencegah dan memerangi korupsi serta membangun generasi yang berintegritas di Indonesia.



# LAMPIRAN